

ANNUAL REPORT

2012



KATA PENGANTAR

Menjadi Motor dan Fasilitator Gerakan Sosial

Pada tahun 2012, keberadaan dan peran civil society dalam pemberantasan korupsi semakin dibutuhkan. Paling tidak ada dua peristiwa besar di mana civil society sangat dibutuhkan. Pertama ketika polisi berupaya melakukan kriminalisasi terhadap KPK, yakni ketika polisi hendak menahan Novel Baswedan dengan dugaan pidana yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Upaya Mabes Polri itu tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi driving simulator yang ditangani oleh KPK. KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo dan sejumlah pihak lainnya dalam penggelembungan harga pembelian driving simulator. Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp. 121 miliar itu, polisi sejak awal berusaha menghambat KPK. Saat KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas, polisi menahan para penyidik KPK sehingga tidak bisa keluar membawa barang bukti. Upaya menghambat KPK dilanjutkan dengan mengusut dugaan penganiayaan berat yang dilakukan Novel Baswedan tahun 2004 saat ia bertugas di Bengkulu. Kasus ini diduga merupakan bentuk kriminalisasi untuk menghambat KPK. Novel adalah polisi yang bertugas di KPK dan menangani kasus *driving simulator* tersebut. Gerakan #SaveKPK yang digalang oleh civil society bahkan melakukan aksi demonstrasi tengah malam di gedung KPK untuk mempertahankan Novel Baswedan agar tidak ditangkap oleh polisi.

Tekanan yang digalang oleh civil society melalui #SaveKPK bukan hanya membuat Polisi urung menangkap KPK. Tekanan juga dilakukan agar Presiden sebagai atasan Kapolri mau turun tangan agar membuat polisi tidak menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Melalui sejumlah aksi demonstrasi di berbagai kota dan pernyataan sikap dari berbagai elemen dari civil society, akhirnya Presiden memerintahkan Kapolri untuk menyerahkan penanganan kasus korupsi *driving simulator* ke KPK. Sebelumnya Polisi bersikeras untuk menangani kasus itu. Tentu mudah diduga, penanganan Polri justru untuk mengamankan kepentingan tertentu, terutama mereka yang turut menikmati hasil korupsi. Hasil lain dari gerakan #SaveKPK adalah ditariknya Rancangan UU KPK. RUU ini hendak merevisi UU KPK yang saat ini ada. Revisi UU KPK itu dilakukan oleh sejumlah politisi sebagai “balasan” terhadap KPK yang menangkap sejumlah politisi karena praktik korupsi. Karena tekanan publik yang besar, akhirnya RUU yang hendak mengamputi sejumlah kewenangan KPK itu ditarik kembali oleh partai politik di DPR.

Peran penting kedua yang ditunjukkan oleh civil society melalui penggalangan dana. Gerakan Saweran KPK digalang oleh civil society untuk menekan DPR yang membintangi anggaran pembangunan gedung KPK. Kode bintang di dalam APBN adalah tanda untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya belum disetujui oleh DPR. Mengapa DPR menolak pembangunan gedung KPK? Jelas dan sangat terang-benderang, pembintangan anggaran itu adalah wujud dari ketakutan DPR terhadap KPK yang memenjarakan sejumlah politisi yang terlibat kasus korupsi.

Saweran KPK akhirnya mampu mengumpulkan dana dari masyarakat hingga Rp. 403,6 juta. Keberhasilan Saweran KPK tidak diukur dari besarnya uang tetapi justru partisipasi masyarakat dari segala lapisan dan golongan. Anak-anak sekolah, mahasiswa, dan berbagai organisasi masyarakat mengumpulkan uang mereka untuk membantu KPK. Dukungan melalui donasi kepada KPK merupakan bentuk riil dari dukungan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saweran KPK mampu memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menonton tetapi berpartisipasi secara aktif untuk memberantas korupsi dengan menyumbang pembangunan gedung KPK. Gerakan Saweran KPK akhirnya berhasil memaksa DPR untuk menghapus tanda bintang di anggaran pembangunan gedung dan saat ini KPK telah mulai membangun gedung baru.

Peran penting civil society pada tahun 2012 lalu semakin menunjukkan bagaimana pemberantasan korupsi mustahil dilakukan tanpa dukungan riil dari civil society. Bila civil society tidak bergerak, bisa diduga saat ini KPK akan menjadi lumpuh. Bukan hanya karena anggaran dipotong atau pembangunan gedung ditolak, tetapi karena para penyidiknya dikriminalisasi oleh polisi dan kewenangannya diamputasi oleh DPR. Karena civil society, maka kemungkinan terburuk yang harus dihadapi oleh KPK itu tidak terjadi.

Keberhasilan gerakan civil society di atas membuat ICW juga turut berbangga. Terutama karena kasus *driving simulator* itu berawal dari investigasi yang dilakukan oleh ICW. Selain itu, ICW terlibat aktif untuk mengorganisir gerakan Saweran KPK dan #SaveKPK. Namun demikian, peran civil society ke depan akan semakin diperlukan. Pelemahan KPK atau kriminalisasi terhadap pimpinan atau staf KPK akan terus dilakukan. Semakin berhasil KPK membongkar berbagai skandal korupsi, maka ancaman yang dihadapi akan semakin besar. Musuh terbesar dari KPK dan gerakan pemberantasan korupsi adalah keberhasilan. Semakin kita berhasil mendorong pemberantasan korupsi, maka tantangan yang akan dihadapi di masa-masa mendatang akan semakin besar pula. Sebagai konsekuensinya, tugas ICW dan seluruh komponen civil society lainnya juga semakin besar untuk mempertahankan KPK dan gerakan anti korupsi dalam perang melawan korupsi.

Danang Widoyoko
Koordinator ICW



Foto : Muhammad Ali (Jawa Pos)



Foto : Kendal Street Art

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	7
KORUPSI POLITIK	8
MONITORING DAN ANALISIS ANGGARAN	22
HUKUM DAN MONITORING PERADILAN	28
INVESTIGASI PUBLIK	32
MONITORING PELAYANAN PUBLIK	38
KAMPANYE DAN PENGGALANGAN DANA PUBLIK	46
AUDIT KEUANGAN ICW	56
PENGHARGAAN ICW	58



Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)

**DIVISI
KORUPSI
POLITIK**



“Konsolidasi Praktek Korupsi Politik Menjelang Pemilu”



Korupsi politik di DPR dan pemerintahan telah berlangsung lama, namun terkuak lebar di tahun 2012 saat beberapa elit partai politik tersangkut kasus korupsi. Situasi politik sempat guncang saat terbongkarnya korupsi ramai-ramai oleh partai politik yang merampok uang negara melalui APBN atau APBD untuk dana politik. Tahun 2012 juga tahun konsolidasi pemilu, baik oleh penyelenggara maupun partai peserta pemilu. Momentum lain adalah pelaksanaan pemilukada. Integritas dan kualitas proses pemilukada masih lemah, yang ditandai dengan maraknya politik transaksional dan hanya menjadi ajang konsolidasi elit lokal.

Fokus Divisi Korupsi Politik adalah: penganggaran APBN dan APBD yang masih menyimpan penyimpangan dan praktek transaksional kebijakan (mafia anggaran), kelembagaan partai politik khususnya pendanaan yang masih menjadi ruang gelap dan belum mencerminkan kelembagaan partai yang sehat, regulasi pemilu, dan proses pemilukada yang lemah integritas.

FOKUS ISU DIVISI KORUPSI POLITIK



1. Mendorong Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik

Pendanaan partai adalah ruang gelap yang tak dapat disentuh publik dan bahkan kalangan kader partai. Persoalan tersebut paling tidak disebabkan, Pertama, tidak ada pola pelembagaan yang jelas dalam membangun partai yang profesional dan menjamin pendanaan yang transparan dan akuntabel dalam penerimaan, pengelolaan, dan pembelanjaan. Kedua, sebagian besar partai politik di Indonesia tidak memiliki mekanisme pendanaan mandiri dalam mengumpulkan modal politik.

ICW menggunakan pendekatan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk mendorong keterbukaan laporan keuangan partai. Dorongan ICW atas keterbukaan pendanaan partai dilakukan pada sembilan partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, antara lain: Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Hasil uji akses menunjukkan bahwa kesembilan partai politik tidak membangun pelembagaan

keuangan yang transparan dan akuntabel. Hampir semua laporan keuangan partai politik sangat tertutup. Partai politik belum menjadikan aspek transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai komitmen kelembagaan.

2. Riset dan Monitoring Praktek Korupsi Pemilukada di Beberapa Daerah

Fokus pemantauan ICW pada pelaksanaan pemilukada adalah pada pola-pola praktek korupsi yang melingkupinya. Setidaknya ada tiga modus yang terjadi, Pertama, penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas dengan menggunakan kebijakan, utamanya anggaran daerah (program-program APBD) dan penggunaan birokrasi sebagai modal pemenangan. Kedua, praktek politik transaksional khususnya politik uang dalam pemilukada. Ketiga, penggunaan dana kampanye kandidat.

Jaringan Pemantauan Pemilukada di Empat Wilayah

Empat wilayah yang pemilukadanya dipantau adalah Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Kendari dan DKI Jakarta. ICW bekerjasama dengan jaringan daerah dalam memantau proses pemilukada dan riset evaluasi praktek korupsi pemilukada. Di Aceh dengan Masyarakat Transparansi (MATA) Aceh, Di

Kendari dengan PUSPAHAM Kendari, di Jakarta dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Selain itu, ICW juga memberikan training pemantauan bagi jaringan daerah.

Hasil Monitoring Korupsi Pemilukada

Hasil monitoring proses pemilukada di beberapa daerah berhasil mengungkap beberapa modus korupsi pemilukada:

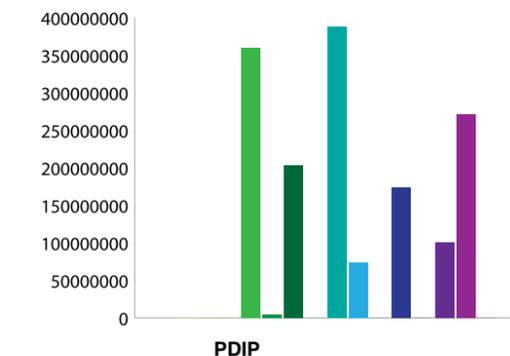
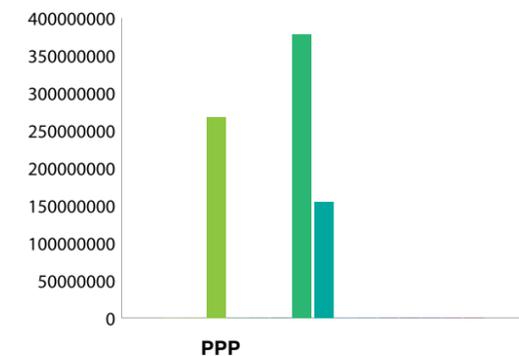
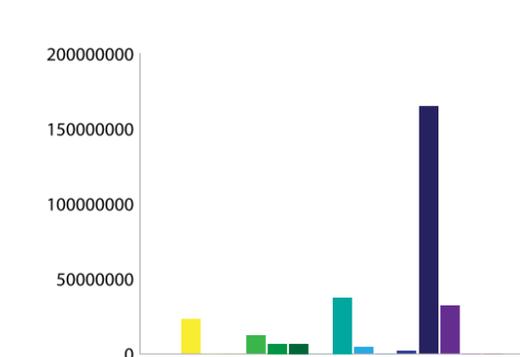
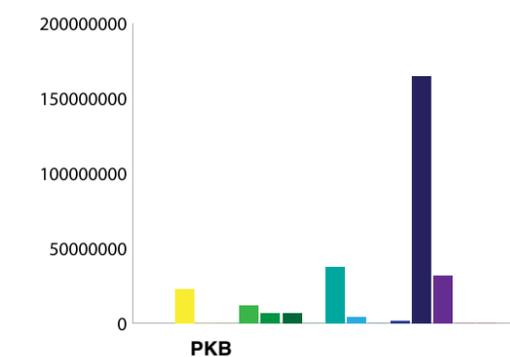
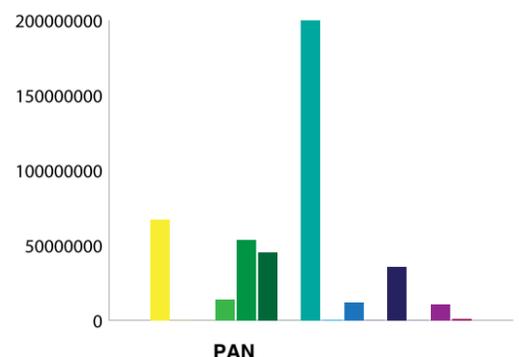
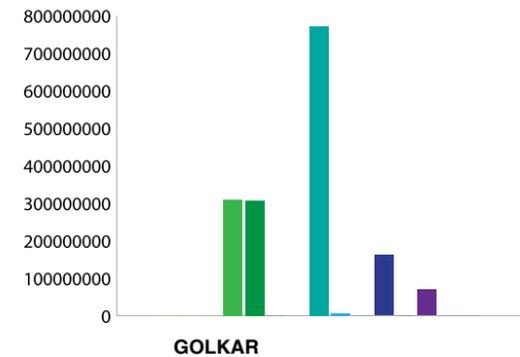
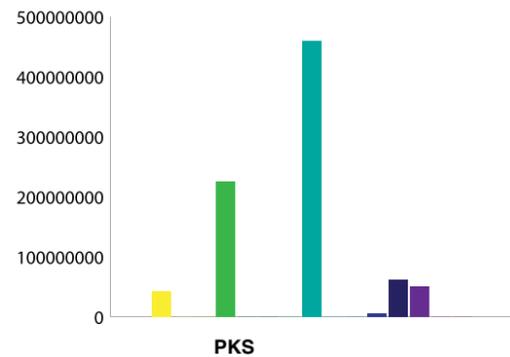
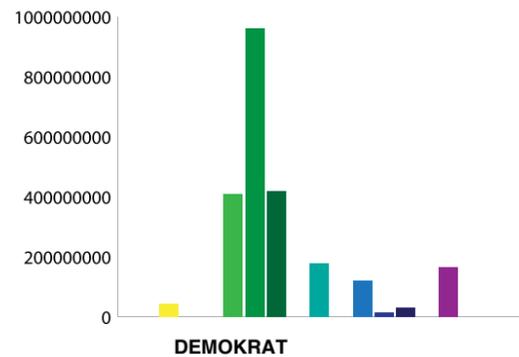
- Dana Kampanye Ilegal
- Menggunakan Kebijakan/ Program/ Anggaran Utamanya APBN/APBD sebagai Modal Pemenangan
- Menggunakan Birokrasi sebagai Instrumen Pemenangan

Modus ilegal lain yang sering digunakan dalam pemilukada adalah menjadikan birokrasi sebagai mesin pemenangan. Strategi ini utamanya dilakukan para incumbent yang memiliki kekuasaan dan akses untuk menggerakkan struktur dan aparat birokrasi sebagai alat pemenangan. Beragam caranya, antara lain:

Tabel Pembelanjaan APBN 8 PARPOL Tahun 2012

Jenis Pengeluaran	Demokrat	Golkar	PDIP	PKS	PAN	PKB	PPP	Gerindra
Pendidikan Politik	Rp44.000.000	0	0	Rp42.270.000	Rp67.200.000	Rp22.975.600	0	Rp22,730,000
Operasional Sekretariat								
1. Administrasi Umum							Rp268.112.999	
a. Keperluan ATK	Rp408.280.815	Rp308.618.400	Rp359.567.960	Rp226.139.300	Rp13.723.520	Rp11.719.400		Rp785,700
b. Rapat Internal Sekretariat	Rp959.975.829	Rp305.665.400	Rp4.333.500		Rp53.608.072	Rp6.504.400		Rp750,900
c. Biaya Perjalanan Dinas	Rp417.188.300		Rp202.962.618		Rp45.350.180	Rp6.468.000		Rp34,606,650
2. Langganan Daya dan Jasa/Gaji							Rp378.427.500	Rp301,200,000
a. Telepon dan Listrik	Rp176.922.561	Rp771.883.195	Rp387.836.242	Rp458.758.630	Rp199.778.803	Rp37.273.900	Rp154.200.671	Rp114,493,568
b. Air Minum		Rp6.456.000	Rp74.114.535		Rp490.500	Rp4.156.200		
c. Internet	Rp120.958.250				Rp11.599.742			
d. Pos dan Giro	Rp13.463.805	Rp161.650.691	Rp174.290.270	Rp6.240.591		Rp1.606.500		Rp274,500
3. Pemeliharaan data dan arsip	Rp31.551.800			Rp62.305.000	Rp35.698.500	Rp164.452.900		Rp918,711
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		Rp69.128.500	Rp100.131.654	Rp51.023.400		Rp31.593.300		Rp14,806,323
a. Beban Perawatan Gedung	Rp166.430.500		Rp271.013.125		Rp10.470.500			
b. Beban Perawatan Kendaraan					Rp803.300			
TOTAL	Rp2.338.771.860	Rp1.623.401.676	Rp1.574.249.904	Rp886.736.921	Rp540.186.817	Rp556.694.100	Rp800.741.170	Rp504,395,752
Penerimaan dari APBN	Rp2.338.771.860	Rp1.623.401.676	Rp1.574.249.904	Rp886.736.921	Rp677.533.896	Rp556.694.100	Rp598.787.856	Rp517,300,000

Grafik Pembelanjaan dana partai politik yang berasal dari APBN

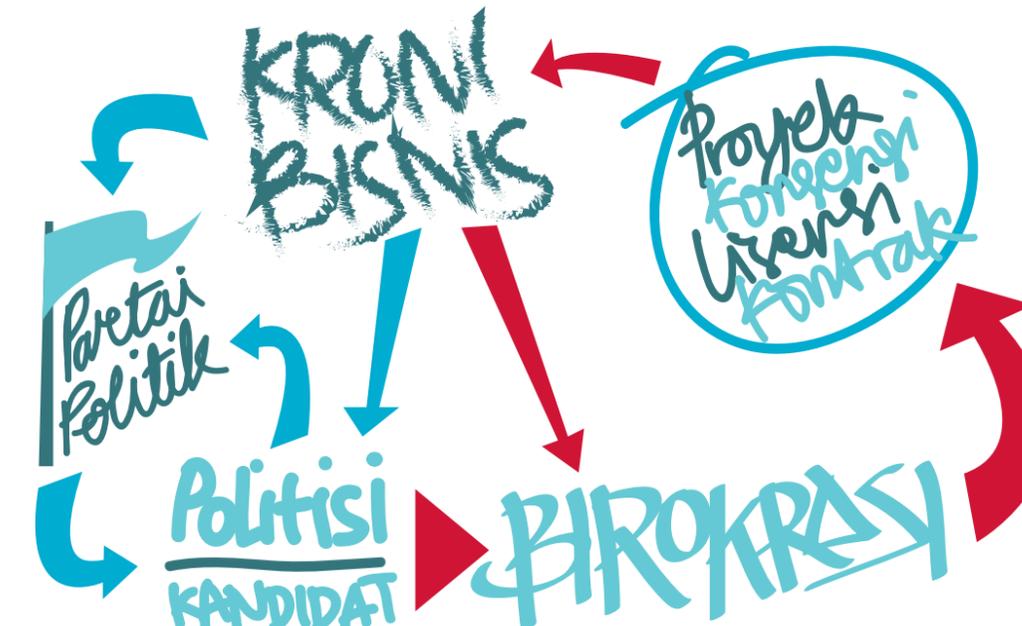


- Beban Perawatan Kendaraan
- Beban Perawatan Gedung
- Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Pemeliharaan data dan arsip
- Pos dan Giro
- Internet
- Air Minum
- Telepon dan Listrik
- Langganan Daya dan Jasa/Gaji
- Biaya Perjalanan Dinas
- Rapat Internal Sekretariat
- Keperluan ATK
- Administrasi Umum
- Operasional Sekretariat
- Pendidikan Politik

Sumber :Dokumentasi Hasil kajian ICW



Lingkaran Setan Korupsi Politik



Modus Politisasi Kebijakan Anggaran dalam Pemilu

Fase Penganggaran	Bentuk Program / Kegiatan
Perencanaan	Memperbanyak Program Iklan Layanan Masyarakat di media cetak & elektronik
	Meningkatkan alokasi program sosialisasi dan koordinasi dengan warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat
	Menambah berbagai kejuaraan yang biasanya diberi embel-embel nama kepala daerah
	Meningkatkan alokasi dana hibah dan bantuan sosialisasi
	Me-mark down dana retribusi untuk modal pemenangan
Penggunaan	<i>Incumbent</i> terlibat dalam pembagian program atau peresmian gedung/jalan/fasilitas publik lainnya seraya minta dukungan
	Mengklaim anggaran dari sumbangan <i>Incumbent</i>
	Mengalokasikan dana hibah dan dana bansos ke kelompok pendukung, keluarga, dan tokoh agama/masyarakat
	Meminta agar sekolah membuat balgo <i>incumbent</i> dari dana BOS
	Menahan anggaran bagi desa/kelurahan yang bukan pendukung
	Meminta <i>kick back</i> dana <i>fresh money</i>
	Memakai dana CSR untuk atribut kampanye
	Penggunaan dana APBD untuk pembuatan atribut kampanye

Sumber : Hasil Monitoring ICW

Modus Politisasi Birokrasi dan Politik Uang dalam Pemilu

No	Modus	Pelaku
1	Pembagian uang secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Tim sukses dan simpatisan - Anggota partai, bagian dari partai, anggota dewan, dan bupati - Aparat pemerintah (Camat, Lurah, RT, RW, dan PNS) - Lain-lain (organisasi profesi, masyarakat umum, dan tidak jelas) - Istri, anak dan yang mempunyai kekerabatan
2	Pembagian asuransi khusus ojek	
3	Pembagian sembako, mie, ikan	
4	Pemberian kerudung, sajadah, helm dan bentuk pakaian lain	
5	Pemberian bibit tanaman	
6	Pemberian janji door prize	
7	Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah	
8	Pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan	
9	Pembagian sembako dan sarung	
10	Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama	
11	Mentraktir makan secara massal warga	
12	Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS	
13	Pengobatan gratis	
14	Uang baso	

Sumber : Hasil Pemantauan Pemilu ICW 2012

Deklarasi Warga Menolak Politik Uang

Sumber ; Dokumentasi ICW



Sinergi dengan Masyarakat dalam Mendorong Pemilukada Berintegritas

ICW juga bersinergi dengan masyarakat dalam mendorong proses pemilukada yang berintegritas. Ini memberikan dampak positif dalam kerja jaringan demokrasi. Selain bagian dari proses pendidikan politik terhadap pemilih, sinergi juga menjadi perlawanan atas politik uang dalam pemilukada. Salah satu aktivitasnya adalah melakukan deklarasi bersama ICW dan Warga yang menolak politik uang pada Pemilukada DKI Jakarta.



Foto : Dokumentasi ICW

Kerja-Kerja Advokasi Non Program Divisi Korupsi Politik

Divisi Korupsi Politik juga mengadvokasi beberapa isu strategis, yaitu: monitoring korupsi DPR, pemantauan dan advokasi kasus mafia anggaran, serta pemilu.

I. Pemantauan Parlemen

I.1. Pengawasan Kasus Mafia Anggaran DPR

Divisi Korupsi Politik melakukan pemetaan, pengkajian, pengawasan dana merumuskan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan anggaran di DPR, salah satunya dengan mendorong penuntasan kasus mafia anggaran yang telah diproses, seperti Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID), pembangunan Wisma Atlet, Hambalang, dan pengadaan Al-qur'an. ICW bersinergi dengan beberapa jaringan civil society organization (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Anggaran, yaitu: Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Yappika, dan Transparansi Internasional Indonesia (TII). Fokus kerja koalisi adalah upaya menyikapi dan memberi masukan untuk perbaikan terkait praktek mafia anggaran APBN.

Peta Aktor dan Modus Mafia Anggaran

Aktor Korupsi	Peran
Politikus (anggota DPR/Komis/banggar)	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan proyek yang bisa dia/rekanan kerjakan Menambah anggaran untuk proyek tertentu Meloby/menekan kementerian/lembaga untuk memberikan proyek kepada perusahaannya/perusahaan rekanan Mengarahkan spesifikasi kegiatan/barang untuk perusahaan tertentu Memfasilitasi perusahaan rekanan Mentender suap proyek kepada pemerintah daerah
Birokrat	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan proyek yang diarahkan ke perusahaan tertentu Mengusulkan tambahan anggaran untuk proyek tertentu Memastikan proyek kepada perusahaan milik politikus.rekanannya dengan cara memanipulasi tender Mengarahkan spesifikasi kegiatan/barang untuk perusahaan tertentu
Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> Melobby politikus untuk memfasilitasi memperoleh proyek Menyediakan fee bagi politikus & birokrat Menggunakan perusahaan fiktif & sistem Sub kontraktor
Staf Khusus Kementerian/DPR	<ul style="list-style-type: none"> Penghubung antara pengusaha dengan politikus & elit kementerian Pelaksana transaksi

Sumber : Dokumentasi hasil kajian ICW 2012

I.2. Mendorong Transparansi Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR

Divisi Korupsi Politik melaporkan dugaan pelanggaran etika anggota DPR ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI, yaitu: 1) kasus penghilangan ayat-ayat tembakau, 2) kasus dugaan konflik kepentingan anggota DPR pada pengelolaan Haji, 3) kasus dugaan pembekingan anggota DPR terhadap minuman keras dan ponsel ilegal di pelabuhan Banten, 4) kasus penyalahgunaan wewenang anggota DPR menjenguk koruptor, 5) serta dugaan penyalahgunaan wewenang beberapa anggota komisi III yang menekan Tipikor dan Kejaksaan di Semarang berkaitan dengan proses hukum tersangka korupsi.

Sayangnya, BK DPR tidak sepenuhnya transparan dan jelas dalam menangani kasus-kasus tersebut, apa hasil putusan serta sanksi terhadap anggota DPR yang dilaporkan. Untuk menindaklanjuti

hambatan tersebut, ICW kemudian meminta Informasi daftar kasus yang ditangani BK DPR dalam Masa Kerja 2009-2012 dan hasil putusan setiap kasusnya. Permintaan ini sesuai Pasal 9 angka (1) UU No. 14 tahun 2008 yang mengamanatkan setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Sekjen BK DPR merespon upaya ini dengan memberikan data, tapi data ini belum sesuai harapan. Hingga kini, proses permintaan informasi masih berlanjut setelah Divisi Korupsi Politik sebagai pemohon kembali mengirimkan surat keberatan kepada BK DPR.

II. Pengawasan Kasus Penyimpangan dan Politisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD

Divisi Korupsi Politik mengawal kasus penyimpangan dan politisasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD sebagai advokasi kebijakan anggaran daerah. Ini disebabkan banyaknya penyimpangan dalam penganggaran dan distribusi dana hibah bansos. Dana-dana ini sangat rentan dipolitisasi dan dijadikan modal pemenangan pemilukada, serta rawan disalahgunakan dan mengarah pada praktek korupsi kebijakan APBD.

Divisi Korupsi Politik telah menghasilkan kajian terkait dana hibah bansos di beberapa daerah, melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam mengadvokasi kasus hibah bansos, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan regulasi hibah bansos kepada menteri dalam negeri.

III. Advokasi Isu-Isu Pemilu dan Pemilukada

Divisi Korupsi Politik melakukan pengawasan dan advokasi beberapa isu pemilu, antara lain mendorong KPU untuk menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu syarat administratif calon peserta pemilu dalam proses verifikasi partai, mengawal peraturan teknis KPU tentang dana kampanye pemilu legislatif serta advokasi Rancangan UU Pemilukada.

Sementara ini kegiatan advokasi tersebut telah menghasilkan rekomendasi tentang kajian aturan dana partai, catatan evaluasi dan rumusan rekomendasi atas pengaturan dana kampanye pemilu legislatif, catatan kritis dan rumusan rekomendasi yang disampaikan pada Kemendagri terkait Rancangan UU Pemilukada serta menggalang koalisi masyarakat untuk menolak politisi bermasalah dicalonkan kembali dalam Pemilu Legislatif 2014.



IV. Pemetaan Korupsi Politik Kepala Daerah

Kongkalikong eksekutif dan legislatif terkuak lagi pada tahun 2012. Kepala daerah dan DPRD tak luput menjadi aktor daerah yang akhirnya ditangkap KPK karena melakukan upaya kerjasama melakukan korupsi.

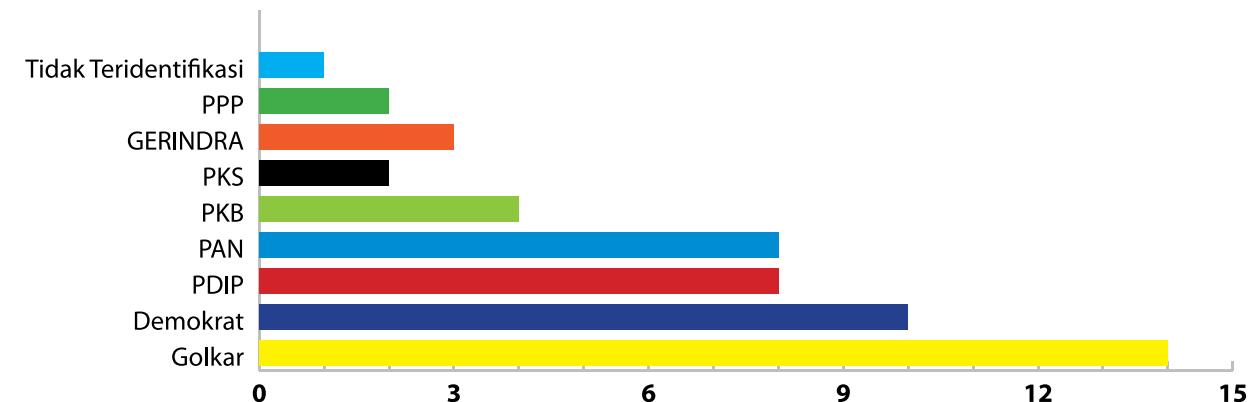
Secara keseluruhan, ICW mencatat ada 45 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 21 orang berasal dari kalangan/mantan DPR/ DPRD, 21 orang lainnya adalah mantan atau kepala daerah aktif, dua pengurus partai, dan satu menteri aktif.

Daftar Korupsi Kepala Daerah 2012

No	Partai	Dapat izin	Belum dapat izin	Ditangani	Jumlah diperiksa
1	Golongan Karya	26	10	16	52
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20	12	1	33
3	Persatuan Pembangunan	4	1	0	5
4	Demokrat	5	4	2	11
5	Amanat Nasional	5	0	0	5
6	Keadilan Sejahtera	0	1	0	1
7	Kebangkitan Bangsa	6	0	0	6
8	Koalisi	15	9	7	31
9	Independen	1	0	0	1
10	Belum teridentifikasi	1	1	0	2
	Total	83	38	26	147

Sumber : Dokumentasi Tren Korupsi ICW 2012

Elit Politik (Legislatif/Eksekutif) yang Tersangkut Kasus Korupsi



Sumber : Dokumentasi ICW 2012



Kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (13 kader), yang disusul Partai Demokrat dengan sembilan kader dan PDI-P dengan tujuh kader.

Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)

DIVISI MONITORING DAN ANALISIS ANGGARAN

Rp



Monitoring Pengelolaan APBN

Salah satu fokus monitoring dan advokasi ICW adalah pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bicara anggaran negara, sudah tentu ada dua sisi yang saling memengaruhi. Sisi pertama adalah bagian penerimaan negara yang setiap tahunnya diharapkan makin optimal. Sementara sisi kedua adalah belanja negara, yang diharapkan makin efisien dan tepat sasaran.

Optimasi penerimaan negara dari sumber daya alam

Sektor sumber daya alam (ekstraktif) masih menjadi penyangga utama penerimaan negara. Tetapi, publik masih belum merasakan kontribusi optimal sektor ini pada penerimaan negara. Terlebih lagi, kegiatan eksploitasi sumber daya alam acap kali mendatangkan efek bencana lingkungan atau konflik sosial di antara masyarakat sekitarnya.

Fokus MAA dalam mendorong transparansi pengelolaan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam adalah:

1. Mendorong pemerintah agar lebih tegas dan serius dalam melakukan renegotiasi kontrak karya tambang. Ini adalah amanat yang terdapat dalam UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba), yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dari pertambangan mineral dan batubara dengan merevisi (menaikkan) tarif royalti tambang serta kewajiban untuk melakukan pemurnian produk pertambangan di dalam negeri. Advokasi dilakukan bersama jaringan koalisi transparansi industri ekstraktif PWYP Indonesia dan jaringan koalisi lingkungan dan hutan.
2. Melakukan penguatan kapasitas dan kemampuan jaringan mitra daerah, khususnya dalam advokasi dan monitoring sektor ekstraktif:
 - a. Bersama SOMASI NTB melakukan penelitian dan advokasi penerimaan negara dari pertambangan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Monitoring difokuskan pada pertambangan yang dikelola PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan mengadvokasi penerimaan pemerintah daerah dari deviden atas kepemilikan saham pada PT NNT.
 - b. Bersama Fitra Riau melakukan penelitian dan advokasi penerimaan negara dari hasil minyak dan gas pada provinsi Riau. Hal ini menjadi strategis karena hampir 40% lebih produksi minyak mentah nasional berasal dari provinsi ini. Disamping itu, ketergantungan APBD dari dana bagi hasil migas sangat besar.



3. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam khususnya penerimaan pajak, ICW mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam mengawasi penerimaan pajak sektor pertambangan. Dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak khusus untuk pertambangan, diharapkan penyimpangan dan kerugian negara dari pajak tambang dapat diminimalisir. Dalam konteks ini, ICW mengadvokasi dugaan kerugian negara dari sektor pertambangan serta akibatnya pada kewajiban pajak perusahaan tambang. ICW juga mendorong agar aparat lebih serius dalam menangani dugaan korupsi atau pidana perpajakan.
4. Melakukan pendataan dan melihat struktur kepemilikan industri berbasis lahan hutan. Dalam rangka mengembangkan database industri perkebunan dan pertambangan yang berada pada kawasan hutan, tahun ini ICW sedang mengembangkan sistem pendataan kepemilikan industri di kawasan hutan. Nantinya, pendataan ini diharapkan dapat juga digunakan untuk kegiatan monitoring dan advokasi penerimaan negara, dan dalam jangka menengah juga mendorong pengelolaan kawasan hutan berwawasan lingkungan.

Transparansi subsidi energi :

Setiap tahun, alokasi dan belanja subsidi energi menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam APBN. Ini disebabkan oleh semakin tingginya harga produk energi dan konsumsi publik terhadap bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, total realisasi subsidi energi adalah sebesar Rp 116,865 triliun tahun 2007 dan diperkirakan membengkak menjadi Rp 305,9 triliun pada tahun 2012.

Catatan kritis Divisi MAA terhadap makin besarnya belanja subsidi energi yang harus ditanggung negara adalah:

1. Masih minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan dan alokasi belanja subsidi energi dalam APBN, dapat dilihat dalam perumusan indikator utama subsidi energi dan besaran anggaran belanja subsidi (lihat box).
2. Belum berjalannya jaminan kebutuhan energi primer untuk kebutuhan dalam negeri, meski sudah diamanatkan dalam UU No 30 tahun 2007 tentang energi. Begitu juga kewajiban "Domestic Market Obligation" pada sektor migas dan batubara. Ini terlihat dari biaya pokok produksi listrik PLN yang begitu tinggi dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh banyaknya pembangkit listrik milik PLN yang harusnya menggunakan bahan bakar gas tetapi dipaksa mengonsumsi bahan bakar minyak. Inilah yang menyebabkan ongkos produksi listrik jauh lebih mahal.





Monitoring dan advokasi pengelolaan biaya haji (BPIH)

Penyelenggaraan kegiatan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun seharusnya diiringi peningkatan kualitas tata kelola dan perbaikan mutu layanan terhadap jamaah. Sayangnya, kondisi ini masih jauh dari harapan publik meskipun setiap tahun terjadi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar oleh jamaah.

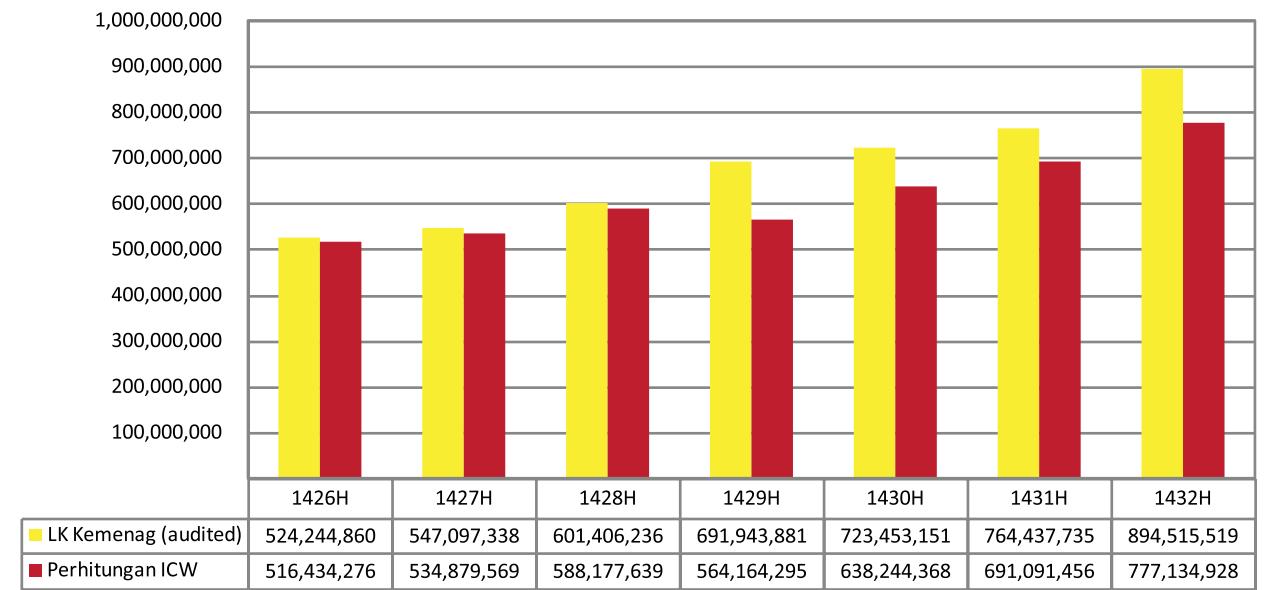
Kenaikan ini tidak saja terjadi dalam biaya pelunasan ongkos haji, tetapi juga kenaikan dalam penggunaan jasa bunga hasil setoran awal jamaah yang dikelola pada rekening Kementerian Agama.

Dari sisi transparansi pengelolaan biaya haji, ICW mencatat dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dugaan penyimpangan BPIH. Salah satu pendorongnya adalah pendapatan bunga dari setoran awal jamaah haji semakin besar, di samping masalah klasik tata kelola ibadah haji yang tidak transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis dan kajian ICW terhadap laporan keuangan haji hasil audit BPK, disinyalir dari tahun 1426H/2005M – 1432H/2011M terjadi dugaan penyimpangan biaya haji senilai US\$ 436.972.189 atau setara dengan Rp 4,151 triliun, dengan asumsi kurs 1 US\$ = Rp 9.500 (lihat tabel). Sementara untuk musim haji tahun 1433H/2012M, ICW mencatat dugaan potensi pemborosan dan kerugian jamaah diperkirakan mencapai US\$ 77,9 (setara dengan Rp 740 miliar).



Perbandingan Realisasi BPIH tahun 1426H/2005M - 1431H/2011M Kemenag VS ICW (US\$)



Guna mendorong perbaikan dalam pengelolaan ibadah haji serta adanya jaminan kualitas layanan terhadap jamaah, ICW bersama kelompok masyarakat sipil lainnya secara aktif melakukan kampanye baik dalam rangka perbaikan peraturan maupun penguatan sisi transparansi dan akuntabilitas publik. Ada beberapa hal yang menjadi isu utama dalam perbaikan pengelolaan ibadah yaitu :

1. Harus ada pemisahan kelembagaan pengelolaan ibadah haji dimana regulator, operator dan evaluator tidak berada pada kelembagaan yang sama yaitu pada Kementerian Agama.
2. Perbaikan regulasi ibadah haji, termasuk transparansi pengelolaan setoran awal dan ongkos haji (BPIH) dengan cara mendorong revisi UU Penyelenggaraan haji (UU No.34 tahun 2009).
3. Penegakan hukum dan pemberian efek jera dalam dugaan korupsi haji dengan cara melaporkan dan mendorong aparat penegak hukum (khususnya KPK RI) untuk bekerja lebih optimal.
4. Mendorong transparansi dalam pembahasan ongkos haji (BPIH) serta menjamin manfaat penggunaan jasa bunga tabungan haji hanya untuk kepentingan jamaah bukan biaya operasional aparat.

DIVISI HUKUM DAN MONITORING PERADILAN



DIVISI HUKUM DAN MONITORING PERADILAN

Memberantas korupsi di Indonesia butuh dukungan banyak pihak, termasuk partisipasi masyarakat. Bersama koalisi masyarakat sipil dan jaringan antikorupsi, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP) ICW melakukan sejumlah upaya mendukung dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi pada tahun 2012.

Salah satu keberhasilan advokasi yang dilakukan bersama masyarakat pada tahun 2012 adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan masyarakat untuk menghapus izin pemeriksaan bagi kepala daerah yang diperiksa dalam perkara korupsi. Sebelumnya, prosedur permintaan izin terhadap kepala daerah dinilai menghambat kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Putusan MK sesungguhnya merupakan “angin segar” bagi upaya pemberantasan korupsi. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai izin pemeriksaan kepala daerah, maka hambatan birokrasi dalam penanganan korupsi dapat teratasi. Putusan MK ini harus dimaknai sebagai dukungan terhadap pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi, sekaligus mendorong perbaikan kinerja kejaksaan dan kepolisian dalam penuntasan perkara korupsi menjadi lebih baik di masa mendatang.

Selain itu, Divisi HMP secara rutin melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga hukum dan institusi peradilan secara berkala termasuk pengawalan penanganan kasus korupsi strategis yang tengah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Pengawalan juga dilakukan antara lain terhadap proses eksekusi terhadap koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); mendorong pembatalan pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat publik di lingkungan pemerintah daerah; dan dorongan terhadap pemecatan kepala daerah yang telah menjadi terpidana korupsi. Proses judicial review ke MK juga dilakukan untuk mendorong pemecatan terhadap koruptor kepala daerah. ICW juga memberikan masukan terhadap substansi dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi terhadap Koruptor.

Kegiatan monitoring kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) menjadi salah satu fokus kerja Divisi HMP pada tahun 2012. Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan eksaminasi publik dilakukan terhadap 10 putusan kasus korupsi yang diperiksa dan didili oleh Pengadilan Tipikor di daerah;
2. Melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 84 hakim tipikor (ad hoc dan karir) di 14 Pengadilan Tipikor di daerah;
3. Melakukan penelitian tentang seleksi hakim pengadilan tipikor, dan
4. Melakukan penelusuran terhadap rekam jejak calon hakim pengadilan tipikor dalam proses seleksi yang dilakukan tahun 2012. Respon atas kegiatan tersebut sangat positif khususnya dari Mahkamah Agung yang menjadikan hasil kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim pengadilan tipikor.

Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)

Isu korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan juga menjadi perhatian selama tahun 2012. ICW melakukan sejumlah kajian antara lain: evaluasi kinerja penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan, penerapan instrumen korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan, dan pemetaan celah hukum dan potensi korupsi di sektor kehutanan.

Selain kajian, ICW bersama mitra kerja dari Koalisi Anti Mafia Hutan juga melakukan 4 (empat) kegiatan eksaminasi publik berkaitan dengan isu kehutanan yaitu Eksaminasi Publik terhadap Putusan MK No 45 Tahun 2011 tentang UU Kehutanan, Eksaminasi Publik terhadap Penghentian Penyidikan terhadap 14 Perusahaan Pembalok liar di Riau, Eksaminasi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Hutan; dan Eksaminasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilakukan dengan memberikan hasil kajian dan rekomendasi terhadap penguatan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK. ICW juga menjadi bagian masyarakat sipil yang dalam melawan kriminalisasi penyidik KPK dan pelemahan lembaga antikorupsi ini melalui revisi UU KPK oleh DPR, dan mendorong revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia KPK.

Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)

DIVISI INVESTIGASI PUBLIK

Divisi Investigasi Publik



Penanganan Kasus

Sepanjang 2012, ICW menerima pengaduan masyarakat sebanyak 456 laporan. Namun berdasarkan telaah Divisi Investigasi, hanya 198 dari 456 pengaduan yang punya indikasi unsur tindak pidana korupsi sehingga bisa ditelusuri lebih dalam.

Beberapa laporan telah berhasil dikembangkan Divisi Investigasi dan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Berikut kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang dilaporkan selama tahun 2012 :

No	Kasus	Nilai kerugian negara atau besaran suap	Tanggal pelaporan	Institusi penegak hukum	Perkembangan
1	Indikasi pemerasan dana Komite Sekolah SMAN 1 RSBI Tambun Selatan Bekasi Sebesar Rp 215 juta	Rp 215 juta	14 Mei 2012	Bareskrim Mabes Polri	Penyidikan
2	Indikasi kasus korupsi pengadaan driving simulator di Korlantas Mabes Polri	Rp 122,42 miliar	4 Januari 2012	KPK	Penyidikan, penetapan tersangka DS, SSB, BS
3	Indikasi korupsi dalam kerjasama PAM Jaya dengan mitra swasta	Rp 637,84 miliar	31 Januari 2012		Masih di bagian pengaduan masyarakat
4	Indikasi korupsi dari deviden Pemda NTB pada kepemilikan saham PT Newmont	US\$ 39,8 juta (setara dengan Rp 361,161 miliar)	14 Mei 2012	KPK	Dalam Telaah
5	Indikasi markup biaya penyelenggaraan haji tahun 1433H/ 2012M	US\$ 77,9 juta (setara Rp 701,102 miliar)	14 Juli 2012	KPK	Dalam Telaah
6	Indikasi korupsi penjualan aset PAM Jaya	Rp 7,774 miliar	14 Februari 2012	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	SP3
7	Indikasi markup pembelian 6 unit pesawat tempur Shukoi di Kemenhan	US\$ 78 juta (setara Rp 741 miliar)	2 Maret 2012	KPK	Dalam Telaah
8	Indikasi korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Banten	Rp 34,9 miliar	21 Juni 2012	KPK	Dalam Telaah



a. Kasus Driving Simulator Harus ditangani KPK

Pasca kasus korupsi driving simulator ditangani KPK, Polri seperti tidak mau kalah turut melakukan penyidikan atas kasus yang sama. Tindakan Polri menuai tentangan dari para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri pada 3 Agustus 2012 di Jakarta. Koalisi menilai Polri berupaya melokalisir kasus driving simulator untuk melindungi aktor-aktor lain yang diduga terlibat.

Resistensi Polri juga ditunjukkan dengan melakukan penarikan penyidik dari KPK, bahkan salah satu penyidik KPK diindikasikan dikriminalisasi. Belakangan setelah Presiden "turun tangan", barulah Polri menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus driving simulator kepada KPK.

b. Pengadaan Alutsista Harus Bersih dari Korupsi

ICW yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan penyelewengan dalam pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Maret 2012.

Koalisi menilai ada keganjilan dalam pengadaan pesawat ini. Pertama, diduga terjadi ketidakwajaran harga (mark up) dalam pembelian 6 jet tempur Sukhoi SU-30MK2 sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar 73 juta dollar AS. Kedua, persoalan penggunaan pihak ketiga dalam skema pembelian Sukhoi, di mana seharusnya pembelian ini bisa dilakukan secara langsung G to G, mengingat pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia telah membuat MoU pembelian alutsista, termasuk Sukhoi.



Penguatan masyarakat agar ikut serta melakukan pengawasan pada korupsi di sektor pelayanan publik.

a. Audit Sosial: Mendorong Partisipasi Warga Dalam Pengawasan Pelayanan Publik

ICW mengembangkan instrumen pengawasan yang disebut audit sosial dengan dukungan Ford Foundation. Program pengawasan ini diterapkan di beberapa daerah, diantaranya: Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Gunung Kidul (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah), Surakarta (Jawa Tengah), Blitar (Jawa Timur) dan di Jembrana (Bali).

Fokus kerja di daerah tersebut beragam, mulai dari pengawasan proyek infrastruktur PNPM Mandiri Pedesaan, pelayanan pendidikan, program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), program redistribusi tanah serta pengawasan distribusi pupuk untuk petani.

Hasil signifikan yang pernah diraih dimana mitra ICW di Kota Solo yaitu Yayasan APhi dan KP2KKN berhasil mendorong perubahan pelayanan asuransi kesehatan melalui memorandum of understanding (MoU) bersama Walikota Solo waktu itu yaitu Joko Widodo.

b. Mendorong Perbaikan Pelayanan Air Bersih di Jakarta

Pada 13 Desember 2012, ICW bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan Citizen Law Suit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta dibatalkan. Gugatan ditujukan kepada tujuh institusi pemerintah, yakni: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, dan PDAM DKI Jakarta. PT Aetra Air Jaya serta PT PAM Lyonnase Jaya.



c. Mendorong Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pemerintah sedang menggalakkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem pengadaan elektronik (e-procurement) merupakan alternatif solusi atas masalah-masalah dalam pengadaan konvensional. Bahkan Inpres 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan hingga Desember 2012, sebesar 75% belanja barang K/L harus menggunakan e-procurement Sementara untuk APBD, 40% belanja barang harus menggunakan e-procurement. Namun, masyarakat menilai masih ada ruang terjadinya penyimpangan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses tender.

Maka, ICW atas dukungan The Asia Foundation berusaha mengembangkan instrumen monitoring yang dapat digunakan masyarakat, dengan memanfaatkan sajian data LPSE di setiap kabupaten dan kota. Data tersebut dapat dilihat di website opentender.net

Monitoring di daerah melibatkan organisasi masyarakat sipil, di antaranya: Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) di Kota dan Kabupaten Madiun, Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (Somasi) di Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Formasi di Kabupaten Kebumen, Truth Banten di Kota Tangerang Selatan serta Lembaga Pemantau Independen (LPI) di Makassar.



Foto : Sigit Wijaya (ICW)

Mengembangkan Investigasi Kasus Korupsi di Sektor Tata Guna Lahan

Penegakan hukum di sektor tata guna lahan dan hutan berada pada titik yang memprihatinkan. Padahal kerugian negara yang timbul akibat korupsi pada sektor ini tidak sedikit dan terus berlanjut.

Sejauh ini, proses penegakan hukum hanya berhasil menjerat pelaku tingkat lapangan. Masih sedikit kasus yang melibatkan aktor utama yang dilimpahkan ke pengadilan, bahkan kadang dihentikan pada level penyidikan. Atas dasar itu ICW bersama LSM di daerah membuat pelatihan investigasi korupsi untuk memperkuat advokasi hukum kasus tata guna lahan dan hutan.



Tren korupsi, Memotret kecenderungan Fenomena Korupsi

Selama beberapa tahun terakhir, ICW mencatat kasus-kasus korupsi yang diproses oleh institusi penegak hukum setiap semester. Catatan-catatan ini ditabulasi dan dianalisis, dan hasilnya cukup menakutkan: kita bisa melihat kecenderungan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Meski tidak seratus persen mewakili kondisi korupsi di Indonesia, namun kajian yang dikemas dalam bentuk tren korupsi ini cukup memberi pijakan pengambilan keputusan advokasi kasus korupsi di Indonesia.



Tren Korupsi Kian Meningkat

Pilkada Diduga Jadi Salah Satu Akar Masalah

JAKARTA, KOMPAS – Korupsi masih menjadi momok bagi negeri ini. Jumlah kasus korupsi yang terungkap dan kerugian negara pada semester I tahun 2010 meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Keuangan daerah tercatat sebagai sektor yang paling rentan dikorupsi.

Tren korupsi semester I dari Januari hingga 30 Juni 2010 itu dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/8). Peneliti senior ICW, Febril Hendri, mengakui, kasus korupsi yang dipantau adalah yang statusnya dalam tahap penyidikan oleh penegak hukum, yaitu Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakannya juga sudah ditetapkan.

Menurut Agus, baik tahun 2009 maupun 2010, keuangan daerah, terutama dalam APBD, tetap sebagai sektor yang paling rawan dikorupsi. Keuangan daerah juga menyumbang potensi kerugian negara terbesar, yaitu sekitar Rp 596,232 miliar dengan 58 kasus.

Beberapa kasus korupsi APBD dengan potensi kerugian negara yang besar selama tahun 2010 antara lain pembobolan kas daerah Aceh Utara (Nangroe Aceh Darussalam) sebesar Rp 220 miliar, korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Biar) sebesar Rp 116 miliar, korupsi kas daerah Kabupaten Pasaman (Jawa Timur) sebesar Rp 74 miliar, dan korupsi dana ekonomi daerah di Kabupaten Bowen Digul (Papua) sebesar Rp 49 miliar.

Potret Kasus Korupsi

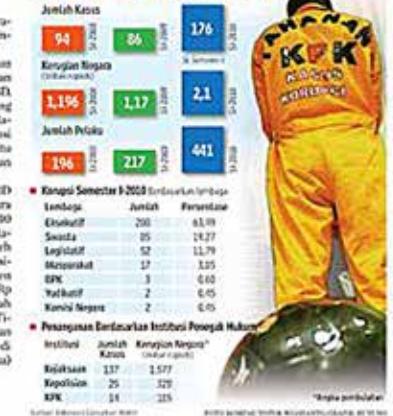


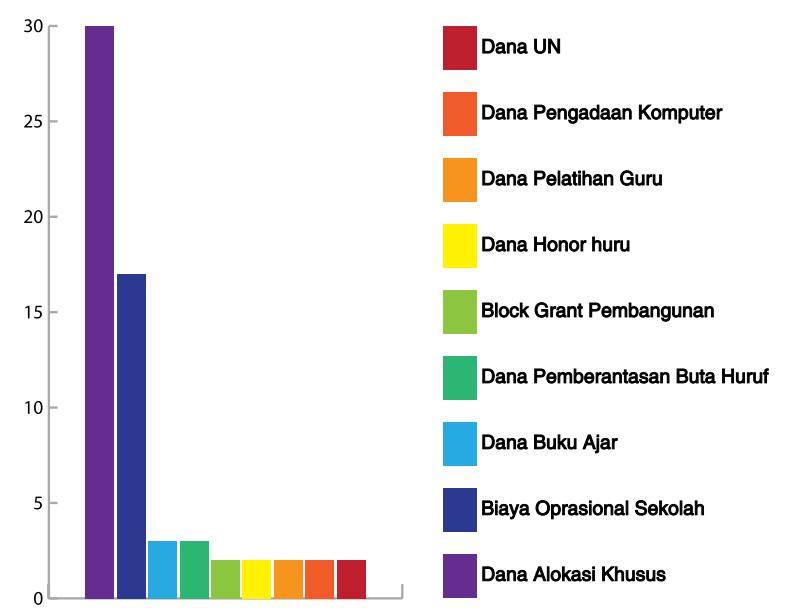


Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)

DIVISI MONITORING PELAYANAN PUBLIK

UJI INFORMASI PUBLIK
Dana Block Grant RSBI
(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)
Tahun 2007 - 2010

Tren korupsi pendidikan 2012



Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Sepanjang tahun 2012, Divisi Monitoring Pelayanan Publik melakukan beberapa kegiatan, khususnya disektor pendidikan diantaranya, merilis tren korupsi pendidikan sepanjang tahun 2011. Tren korupsi pendidikan memperlihatkan kasus tertinggi adalah korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 30 kasus, diikuti korupsi BOS sebanyak 17 kasus. Korupsi dana buku ajar dan dana pemberantasan buta huruf pun ditemukan, masing-masing sebanyak 3 kasus.

Terkait banyaknya kasus di sector pendidikan, secara garis besar ada 3 hal yang dilakukan MPP: 1. Advokasi Kebijakan, 2. Advokasi Kasus 3. Penguatan Masyarakat



Advokasi Kebijakan

a. Bersama Koalisi Tolak Perubahan Kurikulum Membuat Petisi Menolak Perubahan Kurikulum

ICW bersama Koalisi membuat petisi penolakan terhadap perubahan kurikulum, selain karena perencanaannya yang tidak baik juga berorientasi proyek. Salah satu indikatornya adalah kenaikan anggaran yang tadinya dipatok Rp. 600 miliaran kemudian meningkat menjadi Rp 1,45 triliun. Saat ini pendukung Petisi telah mencapai 1.300 orang lebih.



b. Posko Ujian Nasional 2012
Pada 23 April 2012, ICW bersama Federasi Serikat Guru (FSGI) membuka posko penyimpangan ujian nasional 2012. Posko ini dibentuk karena masih banyak ditemukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa kebocoran berlangsung sistematis karena diduga melibatkan guru, pegawai TU hingga Kepala sekolah. Untuk membuktikan kasus kebocoran ini, ICW mengajukan permintaan ke Kemdikbud dan sengketa informasi kunci jawaban ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasilnya, KIP mengabulkan sebagian permohonan informasi ICW. .

c. Judicial Review Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 Ayat (3) bersama Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan

Pada 8 Januari 2013 akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ICW bersama Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan untuk menghapuskan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) karena menimbulkan stratifikasi sosial baru yang bertentangan dengan semangat pendidikan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,

d. Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan di Kabupaten Muna dan Tasikmalaya

ICW bersama masyarakat sipil lokal mendorong pembuatan peraturan daerah (perda) pendidikan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal. Rancangan perda pendidikan merupakan instrumen yang penting karena di dalamnya terdapat komitmen pemerintah daerah dan DPRD atas prioritas anggaran dan tata kelola pendidikan yang akan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut

Advokasi Kasus



a. Melaporkan Dugaan Korupsi di SMAN 1 RSBI Tambun Selatan

Divisi MPP juga melaporkan kasus dugaan korupsi di SMAN 1 RSBI Tambun Selatan. Kasus ini bermula ketika pihak sekolah diminta untuk memberi uang Rp 215 juta untuk mendapatkan anggaran daerah sebesar Rp 3 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan dan laboratorium sekolah. Permintaan dana tersebut diduga diminta oleh salah satu anggota komite sekolah yang sekaligus juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Selain itu, dana RSBI juga diduga diselewengkan untuk kepentingan pejabat Dinas Pendidikan. Sampai saat ini, kasus masih dalam tahap penyidikan di Bareskrim Sus Polda Metro Jaya.

b. Posko Penerimaan Siswa Baru Bersama Ombudsman RI

Pada 22 Juni 2012, ICW bersama Ombudsman RI (ORI) membuka posko penerimaan siswa baru. Setidaknya terdapat 60 kasus terkait pungutan dalam masa penerimaan siswa baru yang dilaporkan. Selain itu, masih ditemukan kasus titip menitip anggota dewan ke sekolah-sekolah tertentu, seperti kasus titipan anggota DPRD di Bandung.

c Sapu Lidi Antikorupsi Bagi Musni Umar (Tersangka Pencemaran Nama Baik

Pada 27 Juni 2012, ICW bersama Koalisi Pendidikan menggalang dukungan publik untuk Musni Umar (Mantan Ketua komite Sekolah SMAN 70 Jakarta) yang dilaporkan ke Kepolisian karena aktif menyuarakan ketidakadilan dan penyimpangan di sekolah melalui tulisan di blog pribadinya. Posko Sapu Lidi Antikorupsi dibentuk sebagai dukungan terhadap Musni Umar maupun masyarakat lainnya yang berani mengungkap ketidakadilan dan praktek korupsi di sekolah mereka.

d. SMPN 28 Menolak Di Jadikan Sekolah Induk TKBM Johar Baru

Kasus ini bermula ketika SMPN 28 menolak menjadi sekolah induk dari TKBM Johar baru. Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa TKBM tersebut sudah diganti sekolah induknya ke SMP 79 di Kemayoran. Pindahan lokasi yang sepihak berdampak pada sulitnya peserta didik di TKBM Johar Baru karena harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah induk barunya. Setelah melakukan serangkaian advokasi, akhirnya pihak dinas pendidikan menetapkan TKBM Johar Baru tetap menginduk ke SMPN 28.

e. Permintaan Eksekusi Ke PN Jaksel Terkait Putusan KIP Terhadap 5 SMPN Di Jakarta

Terhambatnya eksekusi atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap akses informasi RKAS, SPJ dana BOS dan BOP di SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, SMPN 28 dan SMPN 190, mendorong ICW bersama pengacara David Tobing meminta PN Jaksel untuk mengeksekusi putusan KIP. Saat ini proses advokasi tersebut menunggu fatwa MA.

f. Meminta Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kasus Dugaan Korupsi di UI

ICW mengajukan permintaan informasi kepada KIP atas pengadaan barang dan jasa serta surat perjanjian kontrak . pembangunan perpustakaan pusat Universitas Indonesia (UI), karena terdapat dugaan korupsi. Dari hasil ajudikasi, berhasil mendapatkan seluruh salinan kontak kerja serta pengadaan barang dan jasa. Dari dokumen tersebut ditemukan adanya indikasi tanda tangan palsu sehingga dijadikan bukti tambahan bagi penegak hukum.

g Mendampingi Testimoni Guru yang Dimobilisasi Dalam Pilgub DKI 2012

Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, ICW menemukan indikasi adanya guru dan siswa yang dijadikan salah satu alat pemenangan bagi pihak incumbent. Temuan ini akhirnya dijadikan bahan untuk melaporkannya ke panitia pengawas pemilu DKI Jakarta.

Penguatan Masyarakat



a. Lokalatih Community Resource Center Di Pulau Sumba

Lokalatih tentang pengawasan pelayanan publik ini dilakukan di empat kabupaten di pulau Sumba. Lokalatih di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah dilaksanakan pada periode agustus-september di Sumba Barat dan Sumba Timur Peserta lokalatih adalah masyarakat umum, baik kaum ibu, bapak, juga anak muda yang peduli terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Lokalatih Manajemen Berbasis Sekolah dan Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah di Baubau

Praktek korupsi juga terjadi pada tingkat sekolah. Untuk mencegahnya, masyarakat harus ikut berpartisipasi mengawasi jalannya perencanaan dan penganggaran sekolah. Oleh karena itu, ICW melakukan lokalatih untuk orang tua murid dari Kab. Muna, Buton, Buton Utara, dan Kota Baubau. Peserta diajak memahami proses perencanaan dan penganggaran di tingkat sekolah.

c. Workshop Gerakan Forum Warga

ICW bekerjasama dengan Garut Governance Watch (GGW) pada 6-8 November 2012 menyelenggarakan Workshop Penyusunan Kurikulum Gerakan Forum Warga. Kegiatan ini diikuti oleh aktivis GGW dan aktivis Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya (KMRT) di Hotel Banyu Alam, Cipanas, Garut. Forum warga yang terbentuk di masyarakat merupakan salah satu cara memberdayakan warga untuk ikut serta memerangi praktek korupsi di sekitar mereka.

d. APBS Partisipatif Di Garut

IICW berhasil mendorong perubahan kebijakan penyaluran BOS agar bisa langsung masuk ke rekening sekolah tanpa harus mengendap lama di rekening pemerintah kabupaten/ kota. Berkat donasi suporter, ICW bekerjasama dengan Garut Government Watch menggelar pelatihan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif di 28 sekolah di Kabupaten Garut.

e. Citizen Report Card (CRC) Kesehatan di Garut

Program CRC Kesehatan dimulai sejak bulan September 2012 dan dilaksanakan di Garut. Tujuan program ini adalah untuk memotret kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut. Kegiatan yang tengah berlangsung hingga saat ini adalah menyebar kuesioner kepada 1100 responden di 110 kecamatan.

Foto : Farodilah Muqoddam (ICW)





Daftar sekolah dampingan ICW di Garut

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Desa
1	SDN Sukajaya 3	Malangbong	Sukajaya
2	SDN Sanding 2	Malangbong	Sanding
3	SDN Karangmulya 1	Malangbong	Karangmulya
4	SDN Cinagara	Malangbong	Cinagara
5	SDN Sanding 4	Malangbong	Sanding
6	SMPN 4 Malangbong	Malangbong	Cibunar
7	SDN Padasuka 4	Cibatu	Padasuka
8	SDN Wanakerta	Cibatu	Wanakerta
9	SDN Balewangi 2	Cisurupan	Balewangi
10	SDN Wanaraja 2	Wanaraja	Wanaraja
11	SDN Sindangmekar 2	Wanaraja	Sindangmekar
12	SDN Sukahurip 1	Pangatischen	Sukahurip
13	SDN Godog 3	Karangpawitan	Godog
14	SDN Cinta 1	Karang tengah	Cinta
15	SDN Simpen Kaler 3	Limbangan	Simpen
16	SMAN 13 Garut	Limbangan	Limbangan
17	SDN Pasirkiamis 1	Pasirwangi	Pasirkiamis
18	SDN Sukarame 2	Bayongbong	Sukarame
19	SDN Cintanagara 1	Cigedug	Cintanagara
20	SMPN 3 Cisompet	Cisompet	Cisompet
21	SDN Neglasari 5	Cisompet	Neglasari
22	SDN Sindangsari 2	Cisompet	Sindangsari
23	SDN Cihaurkuning 3	Cisompet	Cihaurkuning
24	SDN Rancasalak 1	Kadungora	Rancasalak
25	SDN Cibunar 2	Tarogong Kidul	Cibunar
26	SDN Haurpanggung 2	Tarogong Kidul	Haurpanggung
27	SDN Sukakarya 2	Banyuresmi	Sukakarya
28	SDN Tegalgede 2	Pakenjeng	Tegal gede



DIVISI KAMPANYE DAN PENGALANGAN DANA PUBLIK



Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana Publik

Masalah umum LSM di Indonesia saat ini adalah pendanaan dan keberlanjutan lembaga. Sebagian besar LSM di Indonesia ditopang pendanaan donor luar negeri. Tapi dukungan ini menimbulkan ketergantungan dan pada sebagian LSM, ketergantungan mengarah pada kecanduan atau “addicted to aid”, sehingga tanpa donor, tak ada kegiatan.

Alokasi donor untuk LSM semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, karena donor mengalihkan dukungan kepada pemerintah. Banyak donor juga menganggap bahwa Indonesia sudah demokratis dan punya jalinan masyarakat sipil yang kuat. Bantuan asal Eropa dan Amerika ini juga makin berkurang saat krisis keuangan global melanda kedua benua. Padahal, selama ini merekalah sumber utama pendanaan LSM di Indonesia.

Merespon kondisi itu, pada tahun 2010, ICW memutuskan untuk menggalang dana dari masyarakat dalam negeri. Selain untuk menjaga kemandirian dan mempertahankan keberlanjutan, dukungan masyarakat juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ICW.

Penggalangan Dana Publik ICW

ICW melihat betapa nyata dukungan finansial masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi. Pencarian suporter, sebutan kami untuk masyarakat yang berdonasi, dilakukan di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat belanja, toko buku, dan dalam berbagai acara. Kami menggalang dana lewat sistem transfer dan autodebet. Hingga Desember 2012, ICW sudah bekerjasama melakukan autodebet rekening dengan BNI, BCA, dan Bank Mandiri, serta autodebet BNI bagi semua kartu kredit Visa dan Master.

Sepanjang 2012, ICW telah menggalang dana di berbagai tempat publik, yaitu di: Toko Buku Gramedia (Matraman, Pondok Indah Mall, Plaza Semanggi, Supermall Karawaci, Gandaria City, Grand Indonesia, Kelapa Gading, Plaza Bintaro, Artha Gading), Trimedia Mall Ambassador, Carrefour (Lebak Bulus, MT Haryono), Pejaten Village, Kalibata City, Margo City, Teras Kota Mall, FX, Depok Town Square, ITC Cempaka Mas, Plaza Festival, Gedung Antam, CITOS, Smesco, Blok M Square, dan Cibubur Junction.



Jumlah Donasi Autodebet Per Tahun 2012



Penggunaan Dana Publik ICW



Dukungan dana masyarakat adalah bahan bakar bagi ICW, terutama dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi yang tidak didanai donor. Jumlah kegiatan juga makin beragam berkat dukungan para suporter ICW. Dana donasi digunakan untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, advokasi kebijakan melalui Judicial Review, sidang di Komisi Informasi Publik di beberapa divisi di ICW. Selain itu, donasi juga digunakan untuk mendukung aksi dan penguatan masyarakat dengan kampanye dan pendidikan antikorupsi melalui berbagai metode.

1. Advokasi KPK

Saweran KPK

Anggaran gedung KPK yang ditahan DPR, mendorong ICW yang tergabung dalam koalisi untuk mengadakan saweran KPK. Awalnya pada 12 Juni 2008, KPK mengajukan anggaran pembangunan gedung sebesar 187,90 miliar, namun ditolak DPR. Kemudian, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyurati KPK pada 4 Desember 2008 bahwa anggaran 90 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan gedung KPK. Namun, Komisi III DPR justru memberikan tanda bintang (*) yang berakibat sampai 11 Oktober 2012, anggaran gedung baru KPK tertahan dengan berbagai alasan.

Penolakan DPR memicu kemarahan publik. Di tengah serangkaian pelemahan KPK, DPR justru menunjukkan arogansi dengan menolak anggaran gedung KPK. Apalagi, komitmen sejumlah politikus di Komisi III untuk memperkuat KPK memang diragukan. Maka, sejak 26 Juni 2012, ICW bersama sejumlah kalangan masyarakat memulai gerakan saweran dari rakyat untuk gedung KPK.

Denyut kemarahan dan semangat mendukung KPK mengalir ke banyak daerah. Berbagai kalangan mengecam DPR. Mulai dari akademisi, praktisi, jurnalis, mahasiswa, pedagang kaki lima, pemulung, tukang ojek, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Setelah audiensi dengan pimpinan KPK, sejak 26 Juni 2012, sejumlah tokoh masyarakat menunjuk ICW untuk menampung sumbangan masyarakat melalui Saweran KPK, atau beberapa kalangan juga menyebutnya Koin Rakyat untuk KPK. Saat itu, ICW menampung dana saweran dari masyarakat menggunakan salah satu rekening ICW di BNI Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan nomor 0056124374 atas nama Perkumpulan ICW. Sampai 16 Oktober 2012, saat saweran ditutup, ICW telah menghimpun dana saweran KPK Rp.407.457.312.-.

Ada juga masyarakat yang menyumbang semen, terali besi dan batu bata. Material akan diserahkan di lokasi pembangunan gedung baru KPK. Hingga saweran ditutup di tahun 2012, penyerahan dana belum bisa dilakukan karena harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan KPK. Selama itu pula, dana utuh di rekening ICW.



KPK sempat terhambat ketika menangani dugaan kasus korupsi Simulator SIM Mabes Polri. Untuk mendukung KPK menuntaskan kasus ini, ICW dan koalisi melakukan berbagai aksi, yang menghimpun dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Penguatan Supporter Bola



**BERANTAS
KORUPSI.
BUKAN
BERANTAS
KPK!**

Foto : Totok Wijayanto (KOMPAS)

ICW yang tergabung dalam Koalisi Save Our Soccer (SOS), sejak 2011 aktif mengawasi dugaan korupsi di dunia sepakbola. SOS mendorong supporter bola agar klub yang didukungnya tidak tergantung pada APBD, mempunyai pendanaan yang mandiri, memiliki organisasi yang transparan dan akuntabel, serta memiliki kreatifitas dalam mendukung tim, baik di lapangan dan di luar lapangan.

Hasil advokasi SOS dengan komunitas supporter adalah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 22 tahun 2011 yang menghapus ketentuan penggunaan dana APBD untuk PSSI. Selain itu, PSSI makin terbuka dan bersedia bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan SOS didanai masyarakat lewat penggalangan dana ICW. Di antaranya: Sarasehan Suporter Panser Biru PSIS Semarang Korwil Hooligans 1932 yang juga dihadiri oleh supporter Solo, Kendal, Surabaya dan Magelang pada 24-25 Maret 2012. Acara ini terlaksana berkat kerjasama Save Our Soccer (SOS) yang didalamnya tergabung ICW dengan Hooligans 1932. Sarasehan dihadiri sekitar 100 orang, dengan narasumber Apung Widadi dari SOS, Catur Agus Saptono Wakil Ketua Komdis PSSI, Novel Al Bakrie Manager PSIS, dan Agus Tri, salah satu ketua kelompok supporter PSIS.

PERHATIAN

larang membawa senjata tajam & senjata api
larang membawa barang yang mudah terbakar,
petasan, kembang api dan mercon
larang membawa makanan & minuman
larang membawa hewan



Koalisi dengan VOTE (Voice From the East)

Voice From the East (VOTE) adalah kampanye sosial berbasis budaya yang menyuarakan perdamaian, antikekerasan, antikorupsi, kesejahteraan, pelestarian lingkungan dan demokratisasi untuk Indonesia Timur. VOTE digagas Glenn Fredly dan musisi lain dengan kolaborasi LSM kemanusiaan dan lingkungan seperti KontraS, Kiara, ANBTI, ICW, Imparsial, WALHI, Aman, Demos, Foker Papua dan Jatam. VOTE berusaha menggalang kesadaran tentang keterpurukan Indonesia Timur, sekaligus meningkatkan solidaritas sosial masyarakat untuk Indonesia Timur.

Berkat dukungan finansial dari para suporter, ICW berhasil mengadakan diskusi-diskusi mengenai korupsi di Indonesia Timur di beberapa perguruan tinggi, yaitu

No	Kampus	Tanggal	Perkiraan Peserta
1	Universitas Parahyangan	27 Maret 2012	100 orang
2	Universitas Indonesia	29 Maret 2012	300 orang
3	Universitas Gadjah Mada Jogjakarta	9 Maret 2012	150 orang
4	Universitas Islam Indonesia	11 Maret 2012	150 orang
5	Universitas Kristen Duta Wacana	12 Maret 2012	300 orang
6	Universitas Sanata Dharma	13 Maret 2012	300 orang



Foto : Farodilah Muqodum (ICW)

Album Antikorupsi Frekuensi Perangkap Tikus

Musik bisa digunakan sebagai sirine tanda bahaya untuk melawan korupsi. Ini yang mendasari ICW melalui Gerakan Berani Jujur Hebat merilis album kompilasi yang sarat semangat melawan korupsi yang berjudul Frekuensi Perangkap Tikus. Album ini mengajak masyarakat dan penegak hukum memasang perangkap bagi tikus-tikus koruptor dengan frekuensi yang tepat. Album ini diluncurkan bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2012 lalu. ICW menggandeng sepuluh musisi indie yang punya semangat melawan korupsi untuk mengisi album Frekuensi Perangkap Tikus. Album ini dapat diunduh gratis di www.beranijujur.net, website yang diluncurkan ICW untuk semakin melibatkan masyarakat untuk berani memulai gaya hidup jujur. Masyarakat dapat berbagi cerita, gambar, dan video seputar suka-duka gaya hidup berani jujur di website ini.

Foto : Sigit Wijaya (ICW)



Foto : Loserkids Street Art Pekanbaru

Mural 13 Kota

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2012, ICW bersama jaringan mengampanyekan tema "Berani Jujur Hebat" melalui mural atau street art, sebuah upaya kultural masyarakat untuk menekankan nilai kejujuran. Acara digelar di 13 kota yaitu: Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jakarta, Tangerang, Semarang, Jogja, Solo, Kendal, Wonosobo, Cilacap, dan Magelang. Karya-karya ini bertebaran di berbagai tempat publik, mulai dari samping sekolah, pasar, persimpangan jalan, hingga di depan kantor instansi pemerintah. Karya mereka bisa dilihat di [website beranijujur.net](http://website.beranijujur.net). Mural menjadi pengingat bahwa masyarakat terus melawan korupsi dan bahwa salah satu akar korupsi adalah ketidakjujuran.

AUDIT KEUANGAN ICW TAHUN 2012

Data yang tersedia telah berstatus *audited* dan merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga 31 Desember 2012 berdasarkan hasil Laporan Audit Independen. Lebih lengkap dapat dilihat di www.antikorupsi.org

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas dan setara kas	Rp. 4.546.778.524
Piutang karyawan	Rp. 392.611.684
Piutang lain-lain	Rp. 109.712.000
Uang muka & beban dibayar di muka	Rp. 878.872.832
Piutang program	Rp. 331.556.083
Jumlah aktiva lancar	Rp. 6.259.531.123
Aktiva tetap	
Harga perolehan	Rp. 745.625.625
Akumulasi penyusutan	Rp. (597.213.708)
TOTAL AKTIVA	Rp. 6.407.943.040

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
Kewajiban	
Kewajiban lancar	Rp. 1.139.287.750
Total kewajiban	Rp. 1.139.287.750
Aktiva bersih	
Tidak terikat	Rp. 4.444.458.788
Terikat kontemporer	Rp. 824.196.502
Total aktiva bersih	Rp. 5.268.655.290
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA	Rp. 6.407.943.040

PENERIMAAN	
Dana dari grantor	Rp. 7.404.015.201
Dana tidak terikat	Rp. 4.404.971.971
Total penerimaan	Rp. 11.808.987.172
PENGELUARAN	
Program	Rp. 9.806.999.240
Dana tidak terikat	Rp. 3.525.967.745
Total pengeluaran	Rp. 13.332.966.985
Kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih	Rp. (1.523.979.813)

No	PROGRAM	DONOR	NILAI
1	Promoting Reduction Deforestation Rate and Combating Corruption in Land Use Change Through	Kemitraan	Rp. 321.300.000
2	a. Court Monitoring b. Local Election c. School Budget	MSI	Rp.2.625.940.123
3	Scoping Paper to Apply the Anti Corruption Approach in Combating Deforestation in Indonesia	DFID	Rp. 419.817
4	Strengthening Coordination and Supervision in KPK	UNODC	Rp. 91.397.413
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Pimpinan KPK	The Asia Foundation	Rp. 510.049.000
6	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation	The Asia Foundation	Rp.1.531.498.330
7	E-Procurement	The Asia Foundation	Rp. 416.196.000
8	Increasing Transparency and Accountability in the Management of Natural Resources by Providing Knowledge and Technical Expertise to Local Civil Society Groups and Governments on Extractive Revenue Flows	RWI	Rp. 416.432.808
9	Endorsing People Monitoring on Local Politics and Business Relation	TIFA	Rp. 1.168.492
10	Endorsing Good Governance on Tobacco Policy in Indonesia	Tobacco Free Kids	Rp. 904.116
11	Endorsing Media Participation on Monitoring Campaign Finance	IFES	Rp. 397.889
12	Establishing Transparency and Accountability of Local Information Commission in Five Provinces and Empower The Poor to Conduct Social Audit on the Delivery of Public Services in Six Districts/Cities	Ford Foundation	Rp. 13.433.342
13	Promoting Corruption Eradication to Reduce Illegal Palm Oil Expansion	DOEN	Rp. 155.836
14	a. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lombok Barat b. Pelatihan CRC di Sumba Timur c. Pelatihan CRC di Muna dan Buton d. Assesment Program Pendidikan dan Kesehatan di Bima dan Dompu e. Loklatih Pelayanan Publik Se-Pulau Sumba, NTT	ACCESS	Rp. 263.901.473
15	Fundraising	HIVOS	Rp. 729.638.650
16	Promoting Good Governance in Exploitation of Natural Resources	11.11.11	Rp. 81.181.912
TOTAL			Rp.7.404.015.201

PENGHARGAAN ICW

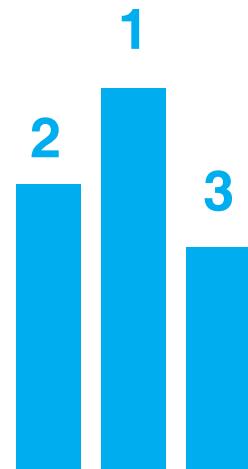
Charta Politika Award

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, menyampaikan pidato saat menerima penghargaan Charta Politika Award untuk kategori aktivis/pengamat politik paling berpengaruh



Termasuk dalam Tokoh Pilihan TEMPO

Tujuh lembaga nirlaba antikorupsi terpilih sebagai Tokoh Tempo 2011. Mereka berangkat dengan satu semangat: peduli terhadap ancaman jahat praktek korupsi, yang dari tahun ke tahun tak kunjung surut. Usaha yang baik ini tentu harus dirawat dan diruwat, agar mereka terus menjadi "anjing pengawas" para pengelola anggaran negara. (sumber : tempo.co)



Peringkat ke 24 Transparency and Good Govenance Think -Tanks

Indonesia Corruption Watch (ICW) meraih peringkat ke-24 sebagai think-tank (lembaga peneliti) di dunia yang giat mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat dunia internasional.



Febridiansyah, Juara Lomba Karya Tulis BPK 2012

Anggota badan pekerja dan peneliti hukum ICW Febridiansyah menjadi juara pertama lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 17 Januari 2013 lalu ia menerima penghargaan itu.



Parlemen Myanmar Belajar Demokrasi di ICW

sebanyak 26 anggota Parlemen Myanmar bertandang ke Indonesia Corruption Watch pada Selasa, 12 Desember 2012. Mereka bermaksud berbagi pengalaman mengenai proses demokrasi dan transisi dalam rangka melakukan terobosan di berbagai bidang seperti pemerintahan, politik, dan pemberantasan korupsi.



DS.12 Anti Tank Yogyakarta

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata, Jakarta Selatan
Tlp : 021.790.1885 / 799.4015 Fax : 021.799.4005
www.antikorupsi.org / www.beranijujur.net
✉ sahabaticw@antikorupsi.org
🐦 @sahabaticw
📘 sahabat ICW